



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**

2025 - 2029



Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33

Telp/Fax (0451) 4015509 Palu 94114

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id

Email : cikasda@sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.7.6.1/803/Bappeda Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat Analisis Gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, penyusunan strategis arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, Lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program pemerintah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dalam rangka Berani Wujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan.

Palu, 14 Juli 2025

KEPALA DINAS
CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH" at the top and "DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR" at the bottom. In the center is a shield-shaped emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE., M.Si
Nip. 19801216 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ...	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	22
2.2.2 Isu Strategi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ...	30
2.2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.....	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
3.1 Tujuan R en s t r a Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	63

3.2 Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	60
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	64
3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	67
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
4.1 Uraian Program	87
4.2 Uraian Kegiatan.....	87
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	98
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	128
 BAB V PENUTUP.....	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana	130
5.3 Tindak Lanjut	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	31
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD ...	71
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	98
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	117
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	128
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk mengarahkan program/kegiatan siklus pelaksanaan perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sudah selayaknya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perhatian dan kontribusi dalam pelaksanaan dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas pelaksanaan tersebut. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi yang penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renstra merupakan perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan programnya serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting terhadap perencanaan, pengelolaan

yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini pengelolaan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat.

Pada prinsipnya pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah semata, tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan keterpaduan, kerjasama, koordinasi yang lebih baik dari berbagai sektor tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun Ke I atau tahapan awal dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sampai 2029, serta Pelaksanaan Tahun Ke II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, serta tahun keempat Rencana Strategi Pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan 2025-2029. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diterbitkan Peraturan pemerintah (PP) No.20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) yang keduanya bertujuan menyambung antara proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan Penganggaran tersebut disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan. Rancangan RENSTRA ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang menjadi tolok ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud :

1. Sebagai acuan/pijakan bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi terhadap pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air secara makro di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah.

Disamping maksud tersebut di atas, maka rencana Strategis ini juga akan dapat bermanfaat :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, menipisnya sumber daya. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara pro aktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. Untuk Pengelolaan Keberhasilan Dengan Perencanaan Strategis organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis untuk berbagai alternative dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa yang akan datang.
4. Agar organisasi dapat bersifat adaptif. Perencanaan Strategis harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada untuk menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategis.
5. Meningkatkan pelayanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan.
Karena itu, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
6. Meningkatkan Komunikasi. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit-unit kerja Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi. Berbagai sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas-prioritas kunci.

7. Meningkatkan Produktivitas. Produktivitas organisasi ditingkatkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Perencanaan Strategis pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan Dinas/Lembaga/Pimpinan organisasi untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangat berhubungan dengan Dokumen Perencanaan Lain:

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ini harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (DPJPN). Sedangkan RPJMN (Periode 2025 -2029) dan RPJMD (Periode 2025-2029) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berwawasan 5 tahunan yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perencanaan teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air memuat arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air dan rencana program kegiatan bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra tersebut menjadi rujukan dan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 dan hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebagai salah satu pelaku pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air,

4. Kementerian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045, Dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024, mengisyaratkan bahwa kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air diharapkan mampu memberikan dampak terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 3.1 Gambaran Pelayanan
 - 3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3.1.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.
- 3.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 3.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;

3.2.2 Isu Strategi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.3 Tujuan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- 3.4 Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- 3.5 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- 3.6 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada bidang kesekretariatan, Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Irigasi dan Rawa, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Air Minum

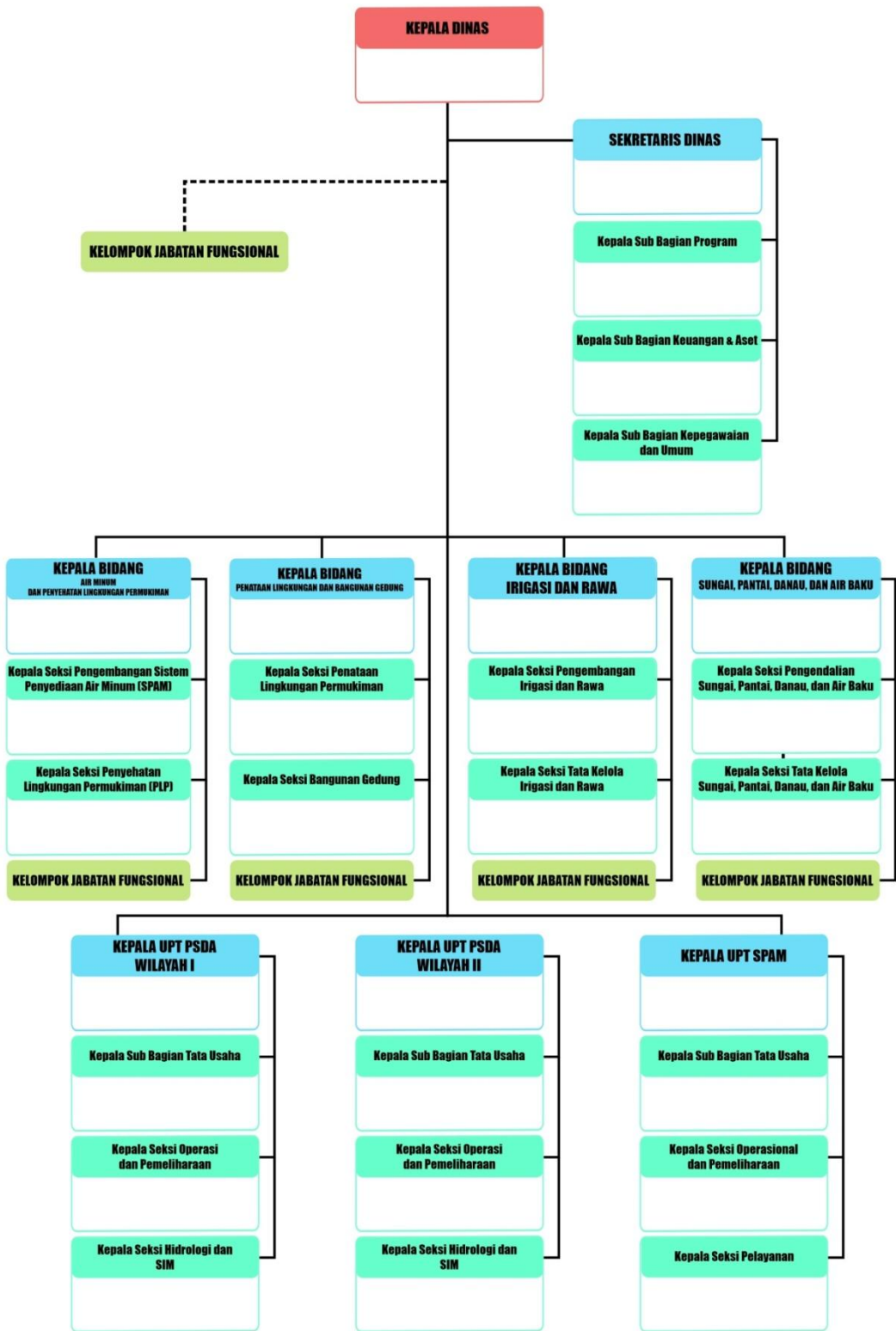
dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai mana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 huruf (a) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan (b) Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada bagan struktur organisas

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.1.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan. Adapun sumber daya manusia yang saat ini bekerja pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Sekretariat, bidang-bidang, UPTD PSDA Wilayah I, UPTD PSDA Wilayah II dan UPT-SPAM) adalah sebagai berikut :

A. Rekapitulasi Pegawai Per Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1.	PNS	174	68,82	99	35,74	273
2.	PPPK	2	0,72	2	0,72	4
TOTAL		176	63,54	101	36,46	277

B. Rekapitulasi Pegawai Per Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1.	I/a	0	0,00	0	0,00	0
2.	I/b					0
3.	I/c	0	0,00	0	0,00	2
4.	I/d	2	0,73	0	0,00	2
5.	II/a	2	0,73	0	0,00	31
6.	II/b	19	6,96	12	4,40	9
7.	II/c	9	3,30	0	0,00	70
8.	II/d	48	17,58	22	8,06	10
9.	III/a	7	2,56	3	1,10	24
10.	III/b	19	6,96	5	1,83	26
11.	III/c	18	6,59	8	2,93	37
12.	III/d	18	6,59	19	6,96	41
13.	IV/a	24	8,79	17	6,23	15
14.	IV/b	5	1,83	10	3,66	5
15.	IV/c	2	0,73	3	1,10	1
16.	IV/d	1	0.37	0	0,00	0
		0	0,00	0	0,00	
17.	IV/e					
TOTAL		174	63,74	99	36,26	273

C. Rekapitulasi Pegawai Per Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1.	SD	2	0,72	0	0,00	2
2.	SMP	3	1,08	0	0,00	3
3.	SMA/SMK	65	23,47	15	5,42	80
4.	D.I	0	0,00	0	0,00	0
5.	D.II	0	0,00	0	0,00	0
6.	D.III	35	12,64	28	10,11	63
7.	S.I/D.IV	53	19,13	34	12,27	87
8.	S2	17	6,14	24	8,66	41
9.	S3	1	0,36	0	0,00	1
TOTAL		176	63,54	101	36,46	277

D. Rekapitulasi Jabatan Struktural (Esselon)

NO	ESSELON	FORMASI	TERISI	LOWONG
1.	II.a	1	1	0
2.	III.a	5	5	0
3.	III.b	3	3	0
4.	IV.a	20	20	0
TOTAL		29	29	0

E. Pejabat Struktural Per Jenis Kelamin

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	I.b			
2.	II.a	1	0	1
3.	II.b	0	0	0
4.	III.a	2	3	5
5.	III.b	2	1	3
6.	IV.a	8	12	20
TOTAL		13	16	29

F. Pendidikan Pejabat Struktural

NO.	PENDIDIKAN	ESSELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	SMA					0
2.	D.I – D.III		0	0	0	11
3.	S1 / D.IV		0	0	11	17
4.	S2		0	8	9	1
5.	S3		1	0	0	
TOTAL			1	8	20	29

G. Rekapitulasi Jabtan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN DAN JENIS KELAMIN						JUMLAH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JUMLAH AHLI	TERAMPIL		JUMLAH AHLI	
		P	W		P	W		
1.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1		1				1
2.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda		1	1				1
3.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2		2				2
TOTAL		3	1	4	0	0	0	4

H. Rekapitulasi Pegawai Per Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Struktural	13	16	29
2.	Fungsional	3	1	4
3.	Pelaksana	158	82	240
4.	PPPK	2	2	4
TOTAL		176	101	277

I. Rekapitulasi PPPK Per Golongan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1.	V	0	0,00	0	0,00	0
2.	VI	0	0,00	0	0,00	0
3.	VII	0	0,00	0	0,00	0
4.	VIII	0	0,00	0	0,00	0
5.	IX	0	0,00	0	0,00	0
6.	X	2	50,00	2	50,00	4
7.	XI	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL		2	50,00	2	50,00	4

J. Rekapitulasi PPPK Per Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1.	SD	0	0,00	0	0,00	0
2.	SMP	0	0,00	0	0,00	0
3.	SMA / SMK	0	0,00	0	0,00	0
4.	D.I	0	0,00	0	0,00	0
5.	D.II	0	0,00	0	0,00	0
6.	D.III	0	0,00	0	0,00	0
7.	S.I / D.IV	2	50,00	2	50,00	4
8.	S2	0	0,00	0	0,00	0
9.	S3	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL		2	50,00	2	50,00	4

b. Aset (Keuangan dan Aset)

Aset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak, alat-alat bengkel, perkakas kecil, alat ukur, alat laboratoruium, alat kantor dan rumah tangga, bangunan dan gedung, instalasi irigasi. Rincian aset yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Aset Tetap dan Aset Lainnya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	31 DESEMBER 2024	KET
Tanah	61.874.289.074,00	
Peralatan dan Mesin	33.649.823.742,00	
Gedung dan Bangunan	108.803.978.829,50	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.831.072.615.349,00	
Aset Tetap Lainnya	4.089.248.263,00	
Konstruksi dalam Pengerjaan	228.626.555.153,25	
JUMLAH ASET TETAP	2.268.116.510.410,75	
JUMLAH ASET LAINNYA	114.524.101.469,00	

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate melalui Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan atau OPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran Kinerja OPD telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ke-Ciptkarya-an dan Sumber Daya Air ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Berikut dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang dicapai berdasarkan target – target tahun 2022 sampai tahun 2024 sebagai berikut pada **tabel 2.3.1** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2024, dan **tabel 2.3.2** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2024.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																		
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	-	-	-	34,20	35,12	35,30	36,05	36,76	28,50	56,98				0,83	1,62			
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	-	-	-	-	-	56,43			-	-	61,21			-	-	1,08		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir (%)	-	-	-	17,10	25,14	29,77	36,59	42,35	6,70	31,18				0,39	1,24			
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi (%)	-	-	-	12,28	13,91	14,92	15,93	17,44	12,60	18,08				1,03	1,30			
	Persentase Layanan Infrastruktur SDA untuk Ketahanan Bencana				-	-	44,69			-	-	96,45			-	-	2,16		
	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi (%)	-	-	-	1,33	1,86	2,40	2,13	2,53	3,40	6,54				2,55	3,51			
	Kapasitas Air Baku (M3/Detik)	-	-	-	-	-	6,32			-	-	1,96			-	-	0,31		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																		
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota (%)	-	-	-	44,08	45,42	51,50	55,08	57,00	41,15	60,06				0,93	1,32			
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	-	-	-	15,38	15,53	15,60	30,46	30,53	0,00	15,65				0,00	1,01			
	Persentase Penduduk Dengan Akses Air Minum (%)	-	-	-	-	-	67,10			-	-	55,04			-	-	0,82		
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah (%)	-	-	-	15,38	23,08	30,77	38,00	0,46154	0,00	0,00				0,00	0,00			
	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Diwilayah Kewenangan Provinsi (%)	-	-	-	-	-	30,77			-	-	10,08			-	-	0,33		

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional (%) Presentase rumah tinggal bersanitasi (%) Kinerja Pelayanan SPALD-S Akses Layak (%)	- - -	- - -	- - -	16,67 0,00 -	17,05 0,00 -	17,81 0,01 76,30	18,95 0,00	20,47 0,000	12,83 0,00 -	17,94 0,00 -				0,77 0,00 -	1,05 0,00 -			
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Luas daerah genangan yang tertangani (%) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi) (%) Persentase Panjang Drainase (%)	- - -	- - -	- - -	3,89 3,55 -	4,07 4,56 -	4,25 5,91 64,6	4,43 7,09	4,61 8,31	3,53 3,10 -	9,06 4,72 -				0,91 0,87 -	2,23 1,04 -			
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman (%)	-	-	-	21,89	23,67	26,37	37,25	41,70	23,31	43,87				1,06	1,85			
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan (%) Persentase kab/kota yang terfasilitasi Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal (%)	- -	- -	- -	23,33 -	26,67 -	33,33 57,62	40,00	46,67	11,44 -	21,86 -				0,49 -	0,82 -			
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP (%)	-	-	-	18,57	20,00	24,49	28,57	32,86	21,00	20,00				1,13	1,00			

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		190.160.843.500	172.244.109.499	314.307.889.693	237.872.437.503	283.226.050.500	232.363.816.604	348.178.091.442	587.239.796.992			34.631.490.019	34.365.930.041	41.541.090.025			973.771.810.697	1.119.986.915.039
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	58.868.443.500	61.258.199.500	183.081.413.337	84.425.243.500	99.498.813.500	50.737.822.488	97.178.156.107	220.733.968.130	-	-	3,92	13,78	2,96	-	-	487.132.113.336	368.649.946.725
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	31.747.757.665	45.108.303.800	46.810.713.799	47.752.548.235	54.347.387.305	29.903.141.309	45.887.750.338	112.157.389.335	-	-	0,94	1,02	2,40	-	-	225.766.710.803	187.948.280.982
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	21.238.173.400	12.648.905.700	16.696.045.701	28.438.182.830	34.766.913.760	10.627.998.682	25.725.329.478	-	-	-	0,50	2,03	-	-	-	113.788.221.391	36.353.328.160
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	4.201.278.435	2.500.990.000	2.700.990.000	5.553.278.435	7.703.278.435	10.076.169.997	24.720.715.691	-	-	-	2,40	9,88	-	-	-	22.659.815.305	34.796.885.688
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	-	-	114.373.663.837	-	-	-	-	107.166.578.860	-	-						114.373.663.837	107.166.578.860
	Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	1.681.234.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.681.234.000	2.681.234.000	130.512.500	844.360.600	1.409.999.935	-		0,08	0,84	0,56	-	-	10.543.702.000	2.384.873.035
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.669.310.000	10.514.100.000	11.508.030.000	14.103.500.000	16.621.680.000	14.251.450.275	16.328.262.575	-	-	-	0,91	2	-	-	-	68.416.620.000	30.579.712.850
	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	14.176.372.201	8.664.100.000	9.398.030.000	11.430.562.201	13.921.680.000	14.251.450.275	16.328.262.575	-	-	-	1,01	1,88	-	-	-	57.590.744.402	30.579.712.850
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	1.492.937.799	1.850.000.000	2.110.000.000	2.672.937.799	2.700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.825.875.598	-
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	2.218.341.850	-	-	-	-	1.963.642.724	-	-	-	-	0,89	-	-	46,15%	1.963.642.724
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	-	-	2.218.341.850	-	-	-	-	1.963.642.724	-	-	-	-	0,89			2.218.341.850	1.963.642.724
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	248.830.000	248.830.000	3.876.334.506	246.484.003	248.830.000	870.220.925	3.546.390.783	3.207.014.471	-	-	-	14,25	0,88	-	-	4.869.308.509	7.623.626.179
	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	248.830.000	248.830.000	248.830.000	246.484.003	248.830.000	870.220.925	3.546.390.783	-	-	-	-	14,25	-			1.241.804.003	4.416.611.708
	Presentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	-	-	3.627.504.506	-	-	-	-	3.207.014.471	-	-	-	-	0,88			3.627.504.506	3.207.014.471
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.494.050.000	8.263.120.000	9.044.250.000	11.084.060.000	13.063.120.000	9.451.876.076	13.407.480.052	21.911.702.700	-	-	9,76	4,42	8,76	-	-	50.948.600.000	44.771.058.828
	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	4.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	6.703.740.026	21.911.702.700	-	-	8,76	3,35	8,76			15.500.000.000	32.615.442.726
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	5.494.050.000	6.263.120.000	6.544.250.000	8.084.060.000	9.063.120.000	5.451.876.076	6.703.740.026	-	-	-	0,99	1,07	-			35.448.600.000	12.155.616.102
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	40.040.820.000	17.458.140.000	19.108.500.000	23.418.150.000	27.599.460.000	53.221.132.320	49.839.902.250	-	-	-	1,33	2,85	-	-	-	127.625.070.000	103.061.034.570
	Persentase Penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman	40.040.820.000	17.458.140.000	19.108.500.000	23.418.150.000	27.599.460.000	53.221.132.320	49.839.902.250	-	-	-	1,33	2,85	-			127.625.070.000	103.061.034.570
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27.058.310.000	37.457.180.000	40.998.110.000	50.244.660.000	59.215.837.000	64.025.301.986	131.172.824.550	287.058.776.239	-	-	2	3,50	7,00	-	-	214.974.097.000	482.256.902.775
	Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	27.058.310.000	37.457.180.000	40.998.110.000	50.244.660.000	59.215.837.000	64.025.301.986	131.172.824.550	287.058.776.239	-	-	2,37	3,50	7,00			214.974.097.000	482.256.902.775
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.149.590.000	2.678.610.000	2.931.820.000	3.593.050.000	4.234.590.000	5.174.522.535	2.339.145.125	10.823.602.728	-	-	1,25	0,87	3,69	-	-	17.587.660.000,00	18.337.270.388
	Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	4.149.590.000	2.678.610.000	2.931.820.000	3.593.050.000	4.234.590.000	5.174.522.535	2.339.145.125	10.823.602.728	-	-	1,25	0,87	3,69			17.587.660.000	18.337.270.388

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilan dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan – permasalahan pembangunan bidang ke-Cipta karya dan Sumber Daya Air akan diuraikan baik secara internal maupun eksternal, untuk mengetahui faktor pendorong munculnya permasalahan tersebut.

a. Permasalahan Sungai Pantai Danau dan Air Baku

Salah satu tugas dan fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah evaluasi berbagai faktor permasalahan dan kendala yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh pemerintah daerah antara lain :

- *Sistem Informasi Sumber Daya Air yang Belum Maksimal*

Permasalahan sistem informasi SDA yang belum maksimal dapat disebabkan belum optimalnya penyediaan data SDA yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu dan mudah diakses. Sistem informasi SDA sangat tergantung pada sebaran pos-pos hidrologi yang secara rasionalisasi masih belum optimum, khususnya pada wilayah sungai kewenangan pemerintah provinsi.

Pemetaan kondisi hidrologis Wilayah Sungai (WS) menunjukkan kondisi : WS Lambunu-Buo baru terdapat 27 unit

sedangkan kebutuhan untuk rasionalisasi masih dibutuhkan sekitar 10 unit automatic water level record (AWLR) khususnya pada sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi. WS Bongka-Mentawa baru terdapat 23 unit dari 38 unit yang dibutuhkan untuk rasionalisasi, WS Laa-Tambalako baru terdapat 18 unit dari 25 unit yang dibutuhkan. WS Banggai Kepulauan belum memiliki pos hidrologi dari 10 unit yang dibutuhkan menurut luas kawasan sebaran hidrologisnya.

Terbatasnya jumlah sebaran pos hidrologi mempengaruhi akurasi data hidrologi suatu wilayah sehingga berpotensi memberikan informasi hidrologi yang kurang akurat pula.

Disamping keterbatasan secara kuantitas, pos-pos hidrologi juga membutuhkan pemeliharaan berupa pergantian unit-unit peralatan yang kurang memenuhi syarat dalam pengukuran dan pengambilan/perekaman data curah hujan, suhu, kecepatan angin, kelembaban, cuaca dan level air sungai.

Pos-pos stasiun pengamatan kondisi hidrologi dioperasikan oleh personil petugas dan pengamat pos hidrologi, harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan disamping kelengkapan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas untuk memaksimalkan kinerjanya dalam sistem informasi hidrologi, hidrometerologi dan hidrogeologi.

- ***Kerusakan Tebing Sungai dan Abrasi Pantai***

Pada tahun 2024 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir mencapai 25,00 % dari target 25,00 %, sedangkan Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi dan akresi air laut oleh infrastruktur pengaman pantai mencapai 15,00 % dari target 15,00 %.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berdampak pada semakin berkembangnya kawasan pemukiman. Pada bagian hilir daerah-daerah sempadan sungai dan pantai beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman sehingga mempengaruhi kondisi alami sungai dan pantai yang dikategorikan sebagai proses terjadinya kerusakan. Pada jangka waktu relatif singkat kerusakan tersebut berpotensi menimbulkan bencana

yang dapat menimbulkan korban jiwa bila tidak tertangani dengan baik.

Perubahan karakteristik sungai dan pantai baik ekologi maupun morfologinya, mempengaruhi kestabilan tebing sungai ataupun garis pantai yang terus menggerus bagian daratan (degradasi dan abrasi) sehingga dapat merusak obyek-obyek vital seperti pemukiman maupun fasilitas umum lainnya yang bersifat progresif. Karakteristik sungai juga sangat ditentukan kondisi daerah tangkapan air pada bagian hulu, penutupan lahan terus terbuka oleh perambahan hutan yang berdampak pada perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kerusakan DAS menyebabkan kemampuan tanah menyerap air berkurang sehingga memperbesar aliran permukaan. Tingginya curah hujan menyebabkan permukaan tanah mengalami erosi yang membawa sedimen bersama aliran permukaan yang akan mengendap pada bagian-bagian tertentu dan menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai merubah profil penampang basah menjadi kapasitas yang lebih kecil. Pada akhirnya volume air tidak tertampung dan menimbulkan luapan yang dapat menggenangi dataran rendah (banjir).

- ***Daerah yang Belum Mendapat Akses Air Baku***

Secara georafis Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat daerah yang sangat kritis terhadap akses air baku disebabkan potensi air baku berupa air permukaan maupun air tanah tidak tersedia. Kondisi ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur air baku untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk kebutuhan usaha pertanian, peternakan dan lain-lain.

Kerusakan yang terjadi pada daerah tangkapan air juga dapat mengakibatkan mengeringnya sumber-sumber mata air sehingga infrastruktur air baku yang telah terbangun menjadi terbengkalai. Olehnya itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian sumber-sumber mata air serta dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas infrastruktur air baku yang telah terbangun agar dapat terus berfungsi dalam memberikan pelayanan dalam pemenuhan

kebutuhan air baku bagi masyarakat. Pada tahun 2024 Kapasitas Ketersediaan air baku sebesar 1,96 % dari target 6,32 %.

- ***Pengelolaan Sumber Daya Air Danau belum Terlaksana***

Pada wilayah sungai kewenangan provinsi terdapat potensi sumber daya air danau yang terbentuk secara alami yang belum dikelola. Berdasarkan data inventarisasi danau provinsi Sulawesi Tengah terdapat 26 lokasi danau dengan total luas kurang lebih 427,51 km² dan volume tampung 88,54 milyar M³. Danau merupakan tampungan air alami yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat langsung berupa konservasi Sumber Daya Air maupun manfaat sosial ekonomi. Kondisi dan karakteristik danau sangat tergantung pada ekosistem daerah aliran sungai. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi adalah proses pendangkalan oleh sedimentasi dan fluktuasi volume air yang tidak stabil.

Fungsi ekologi danau sebagai potensi cadangan tampungan air, saat ini perlu perencanaan pengelolaan sebagai bagian dari konservasi sumber daya air sehingga dapat memberikan manfaat dalam memenuhi ketersediaan air baku.

b. Permasalahan Irigasi dan Rawa

Pengembangan irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan kurang lebih 40 tahun terakhir, dengan memberikan manfaat salah satunya bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Berdasarkan PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2015 Luas Potensial kewenangan Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 47.640 Ha dengan Luas Fungsional data Tahun 2024 adalah 32.435,1 Ha (UPT PSDA wil 1 16.869,1 UPT PSDA Wil 2 15.566) yang tersebar di 30 Daerah Irigasi (9 Kabupaten dan 1 Kota).

Seiring berjalannya waktu, kinerja infrastruktur irigasi mengalami penurunan akibat belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi, hal ini ditunjukkan dengan data hasil survey Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Tahun 2024 sebesar 61,21 % (Kinerja Kurang) dari target 56,43%.

Salah satu faktor pendukung belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi adalah kerusakan jaringan irigasi. Kerusakan ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kegiatan illegal logging dan illegal mining, meningkatnya alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif, rendahnya efisiensi air irigasi akibat borosnya penggunaan air, belum lengkapnya sistem jaringan irigasi dan akibat kejadian bencana alam yang mengakibatkan sarana dan prasarana Daerah Irigasi sebagian besar kondisi rusak, rendahnya kinerja Operasi dan Pemeliharaan (OP), kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum optimal, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, pengelolaan aset dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal.

Faktor lain yang mengakibatkan belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi adalah Pelaksanaan OP irigasi yang belum optimal, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : pelaksanaan kegiatan OP infrastruktur irigasi belum seluruhnya disosialisasikan dan diterapkan sesuai manual OP yang ada karena manual OP belum seluruhnya tersedia. kurangnya kesiapan kelembagaan baik itu P3A/GP3A/IP3A dan personil pelaksana OP, keterbatasan penganggaran kegiatan OP belum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) ditandai dengan rendahnya prioritas kegiatan OP. Akibat dari semua sistim OP kurang berjalan sebagaimana mestinya adalah kinerja irigasi menjadi kurang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi, sementara kita kita ketahui biaya untuk melakukan rehabilitasi akibat OP yang tertunda jauh lebih besar dibanding biaya OP yang mestinya normal dikeluarkan tiap tahun.

Keterpaduan Pengelolaan Irigasi belum optimal menjadi salah satu faktor rendahnya Kinerja Sistem Irigasi, hal ini dikarenakan antara lain : Kurang optimalnya koordinasi antara instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan pemilik kepentingan; kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi masih rendah, kelembagaan pengelola irigasi belum optimal, ketidakpastian pendanaan yang berkelanjutan, akurasi dan pembaharuan pengelolaan data dan informasi irigasi masih kurang, kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai

keahlian/keterampilan yang cukup dalam mendukung Pengelolaan Irigasi.

c. Permasalahan KeCiptakarya

- Sub Urusan Air Minum (urutan sesuai uu 23)

Sub Urusan Air Minum merupakan urusan wajib pelayanan dasar berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sampai dengan tahun 2024 capaian pemenuhan Air Minum Curah mencapai 600 liter/detik dari target 600 liter/detik dan pemenuhan presentase rumah tangga terhadap akses air minum layak sampai dengan tahun 2024 mencapai 87,86 % dari target 88,72 %. Sedangkan indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (berdasarkan SEB.....) merupakan indikator baru dengan target tahun 2025 adalah 30,29 %. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja Air Minum sebagai berikut :

- a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Regional telah disusun pada tahun 2024 namun belum ditindaklanjuti dalam penyusunan studi kelayakan dan perancangan.
- b. Diperlukan peningkatan sistem penyediaan air minum di wilayah kewenangan Provinsi.
- c. Diperlukan kolaborasi dengan OPD yang memiliki tugas sebagai regulator dibidang air minum baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.
- d. Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum.
- e. Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum di kabupaten/kota.

- Sub Urusan Persampahan (urutan sesuai uu 23)

Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sarana prasarana pengelolaan persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi pada tahun 2024 mencapai 32,76 % dari target 30,77 %. Sasaran sosialisasi untuk peningkatan pemahaman Masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 50 orang peserta terdiri dari unsur kelompok Masyarakat dan pengelola persampahan. Beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja persampahan sebagai berikut :

- a. Belum adanya implementasi dari dokumen Rencana Induk Persampahan Regional yang telah selesai disusun tahun 2024.
- b. Masih kurangnya infrastruktur pengolahan persampahan (TPST/TPS3R) di kabupaten/kota.
- c. Diperlukan kolaborasi dengan OPD yang memiliki tugas sebagai regulator dibidang persampahan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.
- d. Diperlukan pembinaan dan peningkatan pemahaman Masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

- **Sub Urusan Air Limbah**

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada tahun 2024 mencapai 7,16 % dari target 5,95 %. Persentase pelayanan air limbah KSP (Sanitasi layak) pada tahun 2024 mencapai 77,04 % dari target 76,00 %. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Persentase pelayanan air limbah KSP sebagai berikut :

- a. Belum disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.
- b. Masih kurangnya infrastruktur pengolahan air limbah (SPALD-S/SPALD-T/IPLT) di kabupaten/kota.
- c. Diperlukan kolaborasi dengan OPD dibidang pengelolaan air limbah domestik ditingkat kabupaten/kota.
- d. Diperlukan pembinaan dan peningkatan pemahaman Masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik.

- **Sub Urusan Drainase**

Presentase Luas Genangan yang tertangani pada tahun 2024 mencapai 64,90 % dari target 64,62 %. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja drainase sebagai berikut :

- a. Belum disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Drainase.
- b. Belum terbangunnya infrastruktur sistem jaringan drainase yang komprehensif di wilayah kewenangan Provinsi.

- c. Diperlukan kolaborasi dengan OPD dibidang sistem jaringan drainase ditingkat kabupaten/kota.
- d. Diperlukan pembinaan dan peningkatan pemahaman Masyarakat terkait sistem jaringan drainase.

- **Sub Urusan Bangunan Gedung**

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja bangunan gedung sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Provinsi.
- b. Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi.
- c. Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara.
- d. DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI daerah rawan bencana alam.
- e. Terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon Bangunan Gedung Negara.

- **Sub Urusan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya**

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pelayanan kinerja bangunan gedung dan lingkungannya sebagai berikut :

- a. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
- b. Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung Negara.
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap isu strategis dalam upaya menciptakan pelayanan public dan mewujudkan visi dan misi RPJMD dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sumber Daya Air						
A. Bidang Irigasi dan Rawa Air Minum	<p>Belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi</p> <p>1. Kerusakan Jaringan Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana Daerah irigasi kewenangan provinsi sebagian besar dalam kondisi rusak - Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi dan akibat kejadian bencana alam. - Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) - Penggunaan air irigasi cenderung boros karena 	<p>1. Isu Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dan kualitas air - Degradasi lingkungan dan ekosistem - Perubahan iklim <p>2. Isu Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadilan distribusi air - Keterlibatan masyarakat - Kesehatan Masyarakat <p>3. Isu Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas Pertanian - Pembiayaan dan keberlanjutan Operasi dan Pemeliharaan 	<p>1. Perubahan Iklim global</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdampak pada perubahan pola hujan, meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir - Sistem irigasi perlu adaptif untuk menghadapi ketidakpastian debit air dan pola tanam. <p>2. Degradasi Ekosistem & Keanekaragaman Hayati</p>	<p>1. Dampak Perubahan Iklim di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola hujan tidak menentu → kekeringan panjang dan banjir bandang. - membutuhkan sistem irigasi yang adaptif dan hemat air (<i>climate resilient irrigation</i>). <p>2. Degradasi Lahan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan sawah irigasi ke non-pertanian (perkebunan, perumahan, industri). 	<p>1. Ketimpangan Akses Air Antar Wilayah</p> <p>2. Perubahan tata guna lahan dikawasan irigasi</p> <p>3. Kerusakan Infrastruktur irigasi</p> <p>4. Ketahanan Pangan Regional</p>	<p>1. Aspek Fungsional Jaringan Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air - Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan - Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air

	<p>rendahnya efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, menyebabkan rendahnya Kinerja Operasi dan pemeliharaan (OP) - Kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum Optimal - Pengelolaan Aset dalam Pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal - Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi <p>1. Pelaksanaan OP yang belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur 	Irigasi	<p>- Dampak: Pengalihan air irigasi dari sungai menyebabkan menurunnya aliran ekologis, hilangnya habitat basah.</p> <p>- Relevansi irigasi: Keseimbangan antara kebutuhan pertanian dan keberlanjutan ekosistem perairan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi luas areal irigasi teknis dan mengancam ketahanan pangan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>irigasi belum seluruhnya disosialisasikan dan diterapkan sesuai manual OP</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual OP belum seluruhnya tersedia- Kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana Operasi dan Pemeliharaan (OP)- Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) belum sepenuhnya tersedia <p>Keterbatasan penganggaran kegiatan OP belum sesuai dengan Angka</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) <p>2. Keterpaduan Pengelolaan Irigasi</p>					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>belum Optimal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang optimalnya koordinasi antara instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan pemilik kepentingan- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi masih rendah.- Kelembagaan pengelola irigasi belum Optimal- Ketidakpastian pendanaan yang berkelanjutan.- Akurasi dan pembaharuan Pengelolaan data dan informasi irigasi masih kurang- Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	Manusia yang mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup					
B. Sungai, Pantai, Air Baku	<p>A. Sistem Informasi SDA belum maksimal</p> <p>1. Belum optimalnya penyediaan data SDA yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu dan mudah diakses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebaran pos pos hidrologi di seluruh WS kewenangan provinsi belum sesuai dengan hasil rasionalisasi. - Peralatan Hidrologi kurang memadai - Kurangnya pembiayaan pemeliharaan pos hidrologi - Meningkatnya 	<p>1. Kualitas Air Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dari limbah domestik, industri, pertanian, dan pertambangan. - Sungai tidak lagi dapat dimanfaatkan optimal untuk air minum, irigasi, perikanan, atau rekreasi. <p>2. Kuantitas dan Aliran Air</p> <p>3. Degradasi Ekosistem Sungai</p> <p>4. Sedimentasi dan Erosi</p> <p>5. Konflik Pemanfaatan Sungai</p>	<p>Degradasi Kualitas Air Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai menjadi tempat buangan limbah industri, pertanian, dan domestik di banyak negara. - Isu global: Sungai-sungai besar dunia (Gangga, Mekong, Nil, Amazon, Citarum) masuk kategori tercemar berat. 	<p>1. Pencemaran Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak sungai besar (Citarum, Bengawan Solo, Brantas, Musi, Kapuas) mengalami pencemaran berat dari limbah domestik, industri, pertanian, dan pertambangan. • Menurunkan kualitas air baku untuk minum, irigasi, dan ekosistem 	<p>1. Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pola curah hujan → banjir, kekeringan, longsor. • Kenaikan muka laut → mengancam pesisir dan pulau kecil. <p>2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deforestasi dan degradasi hutan di hulu. • Erosi dan sedimentasi tinggi → banjir, 	Adanya Potensi rawan banjir limpahan yang disebabkan daerah aliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar.

	<p>intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir dan tanah longsor</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pelaksanaan pelatihan atau OJT untuk para petugas hidrologi dan staf pengolah data SDA - Pembaharuan dan kontinuitas Data SIH3 tidak terintegrasi & terpadu <p>B. Kerusakan tebing sungai dan abrasi pantai</p> <p>1. Masih banyaknya sungai yang kondisinya kritis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seringnya terjadi bencana alam dan kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). 				pendangkalan waduk/sungai.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--

	<p>2. Masih banyaknya Pantai yang kondisinya kritis.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terjadinya bencana abrasi pantai.- Beralih fungsi pemanfaatan sempadan pantai. <p>C. Masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan akses air baku</p> <p>1. Terbatasnya sumber air Baku yang bisa dikelola</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimnya Infrastruktur Air Baku yang terbangun.- Kurang Optimalnya pengelolaan Infrastruktur Air Baku yang sudah terbangun.- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	Sumber air baku					
2. Air Minum						
	<p>A. Masih kurangnya Regulasi Daerah dalam mendukung NSPK Bidang Air Minum</p> <p>1. Belum terarahnya Penyelenggaraan SPAM di Provinsi dan Kab/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusunnya Perda tentang Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Sulawesi Tengah dan Belum tersusunnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Provinsi. - Belum tersusunnya Dokumen Perencanaan RISPAM Lintas 	<p>Akses Masyarakat terhadap Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat (perkotaan vs perdesaan, kaya vs miskin). - Cakupan layanan air minum layak dan aman belum merata. - Banyak masyarakat masih mengandalkan sumur gali atau air permukaan yang tidak higienis. 	<p>Ketersediaan – kualitas – akses – tata kelola – kesehatan – ketimpangan.</p>	<p>Ketersediaan, kualitas, akses, kelembagaan, pendanaan, dan dampak perubahan iklim, yang harus diintegrasikan dalam KLHS untuk menjaga keberlanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan akses dan kualitas layanan antarwilayah. - Kondisi ekologis berbeda (kekeringan, banjir, intrusi laut). - Kapasitas kelembagaan daerah yang tidak merata. 	<p>Belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh system penyedia air minum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan pengguna air minum pada masyarakat perdesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum pada berbagai program

	Kab/Kota 2. Belum optimalnya pemenuhan SPM bidang Air Minum di Kawasan Lintas Kab/Kota B. Masih tingginya angka prefelensi penyakit (sistomiasis, Stunting) 1. Belum optimalnya infrastruktur SPAM <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi hanya di pemenuhan kebutuhan air minum dikawasan lintas kab/kota - Kurangnya porsi penganggaran pembangunan infrastruktur SPAM. - Belum tersedianya dokumen 					<ul style="list-style-type: none"> - Upaya perlindungan sumber air baku dan terhindar dari pencemaran lingkungan.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>perencanaan SPAM.</p> <p>C. belum terkelola dan terpeliharanya Infrastruktur SPAM yang telah dibangun diluar wilayah kewenangan Provinsi</p> <p>1. Sebagian Infrastruktur SPAM yang dibangun berada diluar wilayah kewenangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Perubahan regulasi setelah infrastruktur SPAM terbangun, sehingga tidak memiliki dasar hukum dalam pengusulan penganggaran untuk pengelolaannya- Kurangnya pemahaman stakeholder					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>terkait kewenangan penyelenggaraan SPAM Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola dan memelihara SPAM terbangun dan- Kurang / tidak adanya kelompok masyarakat pengelola SPAM terbangun. <p>D. Infrastruktur SPAM yang telah dibangun belum termanfaatkan dengan baik</p> <p>1. Belum dilakukan serah terima aset ke pemerintah daerah Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyerahan aset belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>Provinsi (OPD)</p> <p>E. Masih kurangnya pemenuhan penerapan SPM Bidang Air Minum di Kab/Kota</p> <p>1. Pemenuhan Air Minum belum menjadi prioritas utama dalam pemenuhan SPM kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">- Steakholder (Pemerintah daerah) belum memahami tugas wajib dalam rangka pemenuhan SPM untuk masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945 <p>2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan provinsi dalam mengawal pemenuhan</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>penerapan SPM di Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum adanya data base tentang akses air minum ditingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta Alokasi anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan penerapan SPM realatif rendah <p>F. Terbatasnya Sumber air baku permukaan untuk Air minum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sumber air baku permukaan untuk air minum perkotaan mengalami pencemaran<ul style="list-style-type: none">- Manajemen limbah domestik, industri dan pertanian belum optimal2. Keterbatasan Sumber air baku permukaan untuk					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>air minum di perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none">- tidak memiliki Sumber Air Baku- terjadi kerusakan DAS <p>G. Belum optimalnya Kinerja SPAM PASIGALA</p> <p>1. Belum beroperasinya SPAM Pasigala sejak terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi 28 September 2018</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum selesainya proses kajian dan perencanaan perbaikan SPAM Regional PASIGALA- Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan lahan- Belum adanya Nota Kesepakatan yang baru- Kurangnya					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	ketersediaan anggaran untuk biaya Operasional dan Pemeliharaan - SPAM yang beroperasi mengalami penurunan fungsi akibat kurangnya kapasitas pengelola					
3. Persampahan						
	A. Masih tingginya timbulan sampah domestik yang belum tertangani 1. Masih rendahnya layanan dan kualitas pengelolaan sampah domestic - Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan persampahan yang belum					-

	<p>tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kewenangan Provinsi belum tersedia- Lemahnya Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan persampahan- Kelembagaan belum efektif dan efisien.- Terbatasnya pendanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan.- Kurangnya kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kesepakatan Wilayah kewenangan Provinsi (Regional) dalam menangani sektor Persampahan. 					
4. Air Limbah						
	<p>A. Masih tingginya angka penyakit yang disebabkan sanitasi buruk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya akses dan kualitas pengelolaan sanitasi (air limbah) layak dan aman <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan 					<p>Akses pelayanan sanitasi dan air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>

	<p>Sanitasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum tersedianya dokumen perencanaan Teknis Sistem Pengelolaan Sanitasi pada Provinsi Sulawesi Tengah- Kelembagaan yang belum aktif dan efisien pada pengelolaan sanitasi- Lemahnya pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Sanitasi- Kurangnya Kegiatan Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sanitasi kepada masyarakat					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya wilayah kewenangan provinsi (Regional) dalam menangani sektor sanitasi - Belum adanya komitmen pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dalam hal kerja sama penanganan sanitasi (Regional) 					
5. Drainase						
	<p>A. Masih tingginya potensi genangan di kawasan permukiman</p> <p>1. Belum optimalnya infrastruktur sistem drainase permukiman</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sistem drainase terutama di perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini - Diperlukan master plan

	<ul style="list-style-type: none">- Belum terdapatnya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan Drainase- Belum terdapatnya dokumen perencanaan sistem drainase permukiman sesuai kewenangan- Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Drainase yang masih lemah- Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi dalam menangani sektor drainase					penanganan drainase yang terintegrasi.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------

6. Permukiman						
	<ul style="list-style-type: none"> - Akses air minum layak belum merata di wilayah perdesaan dan permukiman terpencil. - Sebagian PDAM menghadapi persoalan teknis dan finansial (NRW tinggi, pelayanan tidak kontinyu). - Kualitas air tidak selalu memenuhi standar kesehatan. - Infrastruktur jaringan perpipaan belum menjangkau semua kawasan permukiman baru atau padat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan Akses Air Minum Layak - Ketersediaan dan Keberlanjutan Sumber Air - Kualitas air minum 	<p>Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran global: limbah industri, pertanian (pupuk, pestisida), domestik. - Mikroplastik dan kontaminan baru (<i>emerging pollutants</i>) ditemukan di air minum. - Intrusi air laut di wilayah pesisir akibat perubahan iklim. 	Akses yang belum merata, keterbatasan air baku, kualitas air yang tercemar, kinerja kelembagaan yang lemah, keterbatasan pembiayaan, serta dampak perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah: PDAM di daerah kecil banyak yang kesulitan keuangan. - Ancaman: Alih fungsi lahan di hulu DAS → debit air berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penduduk menyebabkan tekanan pada layanan air eksisting. - Perubahan iklim mempengaruhi sumber air baku (kemarau panjang, kekeringan). - Potensi pencemaran sumber air dari limbah domestik atau industri. - Keterbatasan fiskal daerah dalam menopang keberlanjutan layanan air minum.
7. Bangunan Gedung						
	A. Perancangan, Pembangunan, Kajian dan pemeliharaan bangunan gedung					

	<p>negara belum tertib.</p> <p>1. Sebagian besar Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara belum sepenuhnya berpedoman pada NSPK</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi- Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>Strategis Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis <p>B. Bangunan Gedung Negara banyak yang tidak berfungsi</p> <p>1. Banyak Bangunan negara yang rusak akibat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi</p> <ul style="list-style-type: none">- DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI kegempaan- terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon bangunan gedung negara					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>C. Tumpang tindihnya program penyelenggaraan kegiatan penataan lingkungan permukiman</p> <p>1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)</p> <p>- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman</p>					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>D. Kurang terpeliharanya bangunan Gedung Negara yang mempengaruhi kepentingan masyarakat baik milik pemerintah maupun BUMN/Yayasan</p> <p>1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Penetapan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Strategis Provinsi - keterbatasan anggaran untuk menyusun Perda/Pergub bangunan gedung Negara</p>					
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya						
	A. Belum optimalnya pelaksanaan					

	<p>kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi</p> <p>1. Masih terbatasnya pengelola teknis yang memiliki sertifikasi dalam membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none">- Diklat yang dilakukan oleh BPSDM Pusat masih terbatas dalam hal kuota- Minimnya anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis <p>2. Kurangnya koordinasi antara Organisasi</p>					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>Perangkat Daerah (OPD) dalam pengusulan anggaran penyelenggaraan Bangunan Gedung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non teknis tidak melibatkan					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>Pengelola Teknis dalam pengusulan Anggaran Biaya Pembangunan Bangunan Gedung</p> <p>3. Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang terbengkalai dan tidak terawat, mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca dan umur bangunan</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan berkala- Terbatasnya anggaran pemeliharaan berkala di					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p> <p>4. Belum adanya pemeliharaan/perawatan Bangunan Cagar Budaya</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani Bangunan Cagar Budaya- Terbatasnya anggaran pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

2.2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan telah menjadi visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu :

“ Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Berani : Memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera.

Sulawesi Tengah : Daerah dengan luas wilayah 61.605,718 km² yang memiliki potensi unggulan dan sumber daya alam yang melimpah.

Pertanian : Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan swasembada pangan.

Industri : Sulawesi Tengah sebagai daerah hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam.

Maju : Mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dengan strategi meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas, meningkatkan PAD, menyediakan lapangan kerja, meringankan beban masyarakat dan memperbaiki tata kelola layanan publik.

Berkelanjutan : Membangun Sulawesi Tengah dengan dasar yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu dengan menerapkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna Visi maka ditetapkan 4 (empat) Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

- Masyarakat Sehat; kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang berlangsung di Sulawesi Tengah memberikan perhatian kepada pemenuhan pelayanan dasar yang diwujudkan melalui pemberian kemudahan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat miskin.
 - Masyarakat Cerdas; pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan daerah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing daerah, yang diwujudkan melalui bantuan operasional sekolah serta pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria.
 - Masyarakat Sejahtera; pembangunan sektor tenaga kerja merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sulawesi menjamin ketersediaan lapangan kerja disektor pertanian dan UMKM.
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Menjamin Semua Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dapat Terjangkau.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.

Pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur yang dirancang secara berkelanjutan akan mendukung daya dukung lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, serta memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan menjamin konektivitas antar daerah.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

- Tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menciptakan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
- Perbaikan layanan birokrasi dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digitalisasi dan inovasi bagi seluruh sektor pelayanan publik dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, maka tujuan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatkan Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya dan Sumber Daya Air.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman, rawan banjir dan abrasi;
2. Meningkatnya Indeks Kinerja sistem Irigasi;
3. Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan;
4. Meningkatnya persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi aman;
5. Meningkatnya kualitas sistem dan pengelolaan persampahan di wilayah kewenangan provinsi;
6. Meningkatnya kualitas penanganan genangan air;
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman;
8. Meningkatnya penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis provinsi.

Sasaran (1). Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman, rawan banjir dan abrasi mengacu pada indikator “Persentase kawasan permukiman yang terlindungi”.

Sasaran (2). Meningkatnya Indeks Kinerja sistem Irigasi, yang mengacu pada indikator “Indeks Kinerja Sistem irigasi”.

Sasaran (3). Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, yang mengacu pada indikator “Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan”.

Sasaran (4). Meningkatnya persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi aman, yang mengacu pada indikator “persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi aman”.

Sasaran (5). Meningkatnya kualitas sistem dan pengelolaan persampahan di wilayah kewenangan provinsi, mengacu pada indikator “Persentase kualitas sistem dan pengolahan persampahan di wilayah kewenangan provinsi”.

Sasaran (6). Meningkatnya kualitas penanganan genangan air, mengacu pada indikator “presentase cakupan drainase dalam kondisi baik”.

Sasaran (7). Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman, mengacu pada indikator “Persentase kualitas infrastruktur permukiman”.

Sasaran (8). Meningkatnya penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis provinsi, mengacu pada indikator “Persentase infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan strategis provinsi”.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Dengan menggunakan pendekatan strategik manajemen sistem dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan diperlukan suatu strategi operasional yang meliputi pembinaan pegawai, koordinasi, pemantapan kelembagaan, pengendalian program dan jaminan mutu konstruksi. Untuk maksud tersebut ditetapkan strategi, berikut:

- a. Peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Regional, maupun Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan terciptanya keterbukaan dan demokratisasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keciptakaryaan dan sumber daya air di Sulawesi Tengah serta sosialisasi bagi aparat terkait, dengan alat ukur strategisnya adalah pertemuan koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan keciptakaryaan dan sumber daya air.

- b. Peningkatan penyelenggaraan pemenuhan infrastruktur permukiman pada sektor air minum dan sanitasi layak dan aman
- c. Peningkatan Pengelolaan keciptakarya dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana keciptakarya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan penyelenggaraan pengembangan sistem pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian serta tata kelola organisasi infrastruktur keciptakarya yang berkelanjutan.
- e. Pembentukan dan peningkatan kelembagaan pengelola infrastruktur keciptakarya
- f. Peningkatan Pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi dan sedimentasi serta terancamnya kelestarian sumber daya air untuk mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, dan terpusat. Alat ukur strategisnya adalah upaya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai, infrastruktur sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- g. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah dengan pengelolaan kebutuhan dan pasokan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
- h. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.

- i. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air baku permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan sumber air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta terkendali.
- j. Pengendalian keberlanjutan fungsi infrastruktur dari daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir yang mengutamakan pendekatan non konstruksi.
- k. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah. Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.
- l. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat Lembaga Dewan Sumber Dayai Air dan Komisi Irigasi
- m. Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
- n. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti : penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Dalam konteks kebijakan pembangunan keciptakaryaan dan sumber daya air di daerah tidak terlepas dari kebijakan Nasional secara makro, untuk itu khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang saat ini belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun arah kebijakan bidang keciptakaryaan mencakup antara lain Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Aman, Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Aman, Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman.

Reformasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi pengelolaan sumber daya air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Implementasi Pengelolaan sumber daya air kedepan harus menempatkan capacity building dalam tahapan strategis. Capacity building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar dapat mewujudkan good governance, yang bercirikan : (1). memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain (2) akuntabel dan transparan mengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi (4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan (5) memiliki komitmen terhadap ekonomi yang berorientasi pasar. Adapun komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building antara lain : (1) Kapasitas individu masyarakat (dimensi aparat), (2) kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi) (3) kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (dimensi fisik) yang dalam hal ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong tumbuh kembangnya

sektor swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Dalam upaya mendukung dan mendorong upaya percepatan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi operasional, diperlukan rencana tindak (action plan) berupa kebijakan program/kegiatan pembangunan Keciaptakaryaan dan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

A. Sekretaris

1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur Negara.
2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

B. Kebijakan di bidang Sumber Daya Air

1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air berdasarkan :
 - a. Keserasian antara konservasi dan pendayagunaan
 - b. Keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah;
 - c. Keserasian antara pengelolaan kebutuhan dan pasokan;
 - d. Keserasian antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan kepada :
 - a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun
 - b. Daerah-daerah irigasi yang jaringan irigasinya rehabilitasi
 - c. Daerah-daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikedalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap

evaluasi pelaksanaan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara partisipatif khususnya dibidang irigasi.

5. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat terkait tentang sumber daya air serta melaksanakan rapat koordinasi tentang sumber daya air pada tingkat local dan regional.
7. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat lembaga Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi.
8. Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
9. Melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti penataan dan penguatan system pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

C. Kebijakan di Bidang Cipta Karya

1. Meningkatkan Penyediaan air minum bagi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan jaringan perpipaan baru pada daerah-daerah kritis atau belum terjangkau pelayanan yang memiliki potensial sumber air, serta pendekatan teknologi tepat guna pada daerah yang tidak memiliki potensi sumber air.

2. Mengupayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap penyediaan air minum, melalui penyusunan program pembiayaan yang efektif dan terjangkau.
3. Penyusunan kebijakan dan strategi bidang keciptakarya.
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan prioritas seperti : Kawasan Strategis Provinsi (KSP), kawasan industri, kawasan stunting, kawasan schistosomiosis, kawasan daerah tertinggal dan lain-lain.
5. Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik regional dalam upaya mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas ancaman penyakit.
6. Melakukan penyusunan kebijakan sistem drainase perkotaan yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan.
7. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase dengan harapan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan limbah dan drainase.
8. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah khususnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memacu kemajuan daerah.
9. Mewujudkan pengelolaan sampah pada kawasan regional melalui penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan membangun, merehabilitasi dan meningkatkan TPA/TPST/SPA serta penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota.

**TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air								
				S.1. Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi	Persentase Kawasan permukiman yang terlindungi (luas kawasan permukiman yang tertangani / total luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi) (%)	12,56	15,45	17,84	21,23	24,12	27,02	
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	25,00	30,76	35,52	42,28	48,04	53,80	
				Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,11	0,13	0,15	0,18	0,2	0,23	
				Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	4,98	4,98	6,0	7,0	8,0	9,0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317
				Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	5	5	5	5	5	5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	5	5	5	5	5	5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar dan Pengaman Pantai	15	15	15	15	15	15	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
					UPT I							
				Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah data Pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	28	27	27	27	27	27	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					UPT II							
				Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	-	5	6	7	8	9	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah data Pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	34	34	34	34	34	34	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15,00	16,51	18,02	19,53	21,04	22,55	
				Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali abrasi dan banjir rob	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
				Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	5,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
					UPT I							
				Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	0,08	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
					UPT II							
				Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	-	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Air Baku (m3/det)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	0,6	0,65	0,73	0,82	0,93	1,00	
				Presentase Layanan Air Baku	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	2	4	6	8	10	
				Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku	4	2	4	6	8	10	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			S.2. Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)		61,21	61,96	62,96	64,21	65,46	66,96	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	62,90	63,65	64,65	65,75	66,85	68,25	
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62,90	63,65	64,65	65,75	66,85	68,25	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,50	2,75	4,00	5,00	6,00	6,75	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (Bendung)	Pembangunan Bendung Irigasi	1	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3	4,5	5,5	7,25	8,75	10,2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5,00	7,50	12,50	17,50	22,50	27,50	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	2	4	5	6	7	7	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	47	55	60	65	70	85	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	10	11	13	16	19	22	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang di Fasilitas Operasionalnya (Lembaga)	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	1	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
					UPT I							
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	252	252	252	252	252	252	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Bendung Irigasi yang terpelihara (unit)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	15	15	15	15	15	15	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317
					UPT II							
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	244	244	244	244	244	244	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Bendung Irigasi yang terpelihara (unit)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	15	15	15	15	15	15	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	3	5	7	9	12	15	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	15	15	15	15	15	15	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			S.3. Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		30,29	32,00	33,00	34,00	37,88	41,76	
				Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24,28	36,79	49,08	61,83	74,34	86,86	
				Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0	0	200	200	200	200	
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	5	4	3	2	3	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/detik)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0	0	200	200	200	200	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/detik)	1.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.1.4 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0	100	150	150	150	100	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1.1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3	2	4	2	2	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.1.6 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5	4	3	2	3	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
					UPT SPAM							
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.1.7 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.1.8 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2	2	2	2	2	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.1.9 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.1.10 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				S.4. Meningkatnya Persentase rumah tangga terhadap Akses sanitasi aman (%)	Persentase rumah tangga terhadap Akses sanitasi aman (%)	7,16	8,37	9,58	10,79	15,00	16,21	
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi aman	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,16	8,37	9,58	10,79	15,00	16,21	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	0	0	0	0	0	0	
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan (M3/Hari)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0	0	0	0	0	0	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi (Unit)	2.1.2 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0	0	0	0	0	0	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M3/Hari)	2.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0	0	0	0	0	0	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	2.1.4 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	50	50	50	50	50	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	2.1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	1	2	1	2	1	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (kabupaten/Kota)	2.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	2.1.7 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	2 Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	2.1.8 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				S.5. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi	Persentase Kualitas Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi (%)	10,08	12,50	25,00	37,50	50,00	100,00	
				Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	1. Program Pengembangan Sisten dan Pengelolaan Persampahan Regional	10,08	12,50	25,00	37,50	50,00	100,00	
				Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)	1.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	0	0	0	0	0	
				Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan (Ton/Hari)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (kabupaten/kota)	1.1.2 Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/Hari)	1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	1.1.4 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.1.5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	0	0	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.1.6 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0	1	2	2	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	1.1.7 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	1.1.8 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	0	2	3	2	2	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				S.6. Meningkatnya Kualitas Penanganan Genangan Air	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	66,91	67,55	68,18	68,8	69,4	69,98	
				Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	66,91	67,55	68,18	68,8	69,4	69,98	

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	66,91	67,55	68,18	68,8	69,4	69,98	
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4	3	5	5	5	5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2	2	2	2	2	2	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	1.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	1.1.6 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	1.1.7 Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			S.7. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Kualitas Infrastruktur Permukiman (%)		83,43	84,74	86,07	87,42	88,80	90,20	
				Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	1. Program Pengembangan Permukiman	83,43	84,74	86,07	87,42	88,80	90,20	
				Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang terbangun	1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	83,43	84,74	86,07	87,42	88,80	90,20	
				Jumlah Unit Pengolahan Setempat/MCK individual yang tersedia (Unit)	1.1.1. Subkeg Penyediaan Unit Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	48	97	85	104	125	100	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan (Liter/detik)	1.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	0	20	8,5	2,5	5	5	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (Liter/Detik)	1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi (Liter/Detik)	1.1.4 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	0	0	0	0	0	0	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (ton/hari)	1.1.5 Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	0	0	0	1	0,1	0,1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			S.8. Meningkatnya penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis Provinsi	Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan strategis provinsi (%)		17,15	21,22	25,29	29,36	33,43	37,50	
				Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1. Program Penataan Bangunan Gedung	10,00	15,50	21,00	26,50	32,00	37,50	
				Presentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.1 Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10,00	15,50	21,00	26,50	32,00	37,50	
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.1.1 Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2. Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	24,29	26,93	29,57	32,22	34,86	37,49	
				Presentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24,29	26,93	29,57	32,22	34,86	37,49	
				Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Kabupaten/Kota)	2.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	2.1.3 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1		Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Indeks Reformasi Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	7	7	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.1.8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	2	2	2	2	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.1.9 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	2	2	2	2	2	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.1.6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	2	2	2	2	2	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase Hasil Tindakanlanjutan Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.2.7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	217	217	556	556	556	556	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.2.5 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.2.8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.2.9 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketetapan	1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.3.3 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.4 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.4.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.4.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	Indikator Pemutahiran SIPD
				Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.4.7 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	50	50	50	50	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.4.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.4.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.4.3 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.4.4 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE)	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti (Laporan)	1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase Tindaklanjuti Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)	1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12	Indikator Pemutahiran SIPD
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi								Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Persentase barang milik daerah yang dipelihara	1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	38	40	40	40	40	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	4	4	4	4	4	Indikator Pemutahiran SIPD
UPT SPAM												
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	14	14	14	14	14	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UPT I												
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	13	13	13	13	13	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UPT II												
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	1	1	
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2	2	2	2	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	3	3	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1	1	Indikator Pemutahiran SIPD

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Sebagai upaya mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025 – 2029.

Adapun program yang menjadi rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

a. Sekretariat

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. UPT PSDA Wilayah I

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

d. UPT PSDA Wilayah II

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. UPT SPAM

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;

a. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

- Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku

b. Bidang Irigasi dan Rawa

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
 - Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan provinsi

c. UPT PSDA Wilayah I

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

d. UPT PSDA Wilayah II

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

III. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

b. UPT SPAM

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

IV. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**
 - Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota

V. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

➤ **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
 - Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

VI. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

➤ **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase
 - Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

➤ **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi (SIPD BANGDA_RENSTR)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi (Kepmendagri 900)
 - Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi

- Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
- Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

VIII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

➤ **Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung**

- Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

IX. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

➤ **Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung**

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaPengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 4.2 PROGRAM, KEGITAN DAN SUBKEGITAN
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor							
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaaryaan dan Sumber Daya Air		
		S.1. Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi			Persentase Kawasan permukiman yang terlindungi (luas kawasan permukiman yang tertangani / total luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi) (%)		
			1.1. Meningkatnya persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				1.1.1. Tersedianya Infrastruktur Pengendali Banjir pada kawasan permukiman	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbinanya Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar dan Pengaman Pantai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT I			
				Terbangunnya Normalisasi Sungai/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah data Pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT II			
				Terbangunnya Normalisasi Sungai/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersedianya data Pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah data Pos Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			1.2. Meningkatnya persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman dari abrasi dan banjir rob		persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				1.2.1. Tersedianya Infrastruktur Pengendali abrasi dan banjir rob	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali abrasi dan banjir rob	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT I			
				Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT II			
				Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			1.3. Meningkatnya penyediaan kapasitas air baku		Kapasitas Air Baku (m3/det)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				1.3.1.Tersedianya Layanan air Baku	Presentase Layanan Air Baku	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	
				Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		S.2. Meningkatkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi			Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)		
			2.1. Meningkatnya Luas layanan irigasi Multikomoditas		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				2.1.1. Meningkatnya Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (Bendung)	Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Beroperasinya Lembaga Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang di Fasilitas Operasionalnya (Lembaga)	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT I			
				Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang terpelihara (unit)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPT II			
				Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang terpelihara (KM)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang terpelihara (unit)	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Daerah Irigasi yang mendapatkan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		S.3. Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan			Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
			3.1. Meningkatnya Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			3.1.1. Terpenuhinya Jumlah Kumulatif Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
			Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/detik)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/detik)	1.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
			Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.1.4 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1.1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.1.6 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				UPT SPAM			
				Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.1.7 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1.1.8 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1.1.9 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	1.1.10 Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			S.4. Meningkatnya Persentase rumah tangga terhadap Akses sanitasi aman		Persentase rumah tangga terhadap Akses sanitasi aman (%)		
			4.1. Meningkatnya Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi aman		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi aman (%)	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				4.1.1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan (M3/Hari)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi (Unit)	2.1.2 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M3/Hari)	2.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	2.1.4 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	2.1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (kabupaten/Kota)	2.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	2.1.7 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Beroperasi dan terpeliharanya Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	2.1.8 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		S.5. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi			Persentase Kualitas Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi (%)		
			5.1. Meningkatnya Persentase Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	1. Program Pengembangan Sisten dan Pengelolaan Persamnahan Regional	
				5.1.1. Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)	1.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Meningkatnya Kapasitas TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan (Ton/Hari)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/KotaTerfasilitasinya Kerja sama	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (kabupaten/Kota)	1.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/Hari)	1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	1.1.4 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.1.5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.1.6 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersedianya sarana penTPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	1.1.7 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	1.1.8 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		S.6. Meningkatnya Kualitas Penanganan Genangan Air			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)		
			6.1. Meningkatnya Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
				6.1.1. Terpelihara dan beroperasinya Sistem Drainase perkotaan yang disediakan	Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)	1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	
				Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbangunnya Sistem Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.1.4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	1.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Tersusunnya Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	1.1.6 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	1.1.7 Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		S.7. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman			Persentase Kualitas Infrastruktur Permukiman (%)		
		3.2. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Permukiman			persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	1. Program Pengembangan Permukiman	
				Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang terbangun	1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
				Tersedianya Unit Pengolahan Setempat/MCK individual di KSP	Jumlah Unit Pengolahan Setempat/MCK individual yang tersedia (Unit)	1.1.1. Subkeg Penyediaan Unit Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terlaksananya peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan (Liter/detik)	1.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (Liter/Detik)	1.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi (Liter/Detik)	1.1.4 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (ton/hari)	1.1.5 Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		S.8. Meningkatkan penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis Provinsi			Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan strategis provinsi		
			7.1. Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1. Program Penataan Bangunan Gedung	
				7.1.1. Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Presentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.1 Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.1.1 Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	1.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			7.2. Meningkatnya Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2. Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	
				7.2.1. Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Presentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
				Terbinanya dan terawasinya Kabupaten/Kota dalam penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Kabupaten/Kota)	2.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tertatanya Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	2.1.3 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
			Meningkatnya Indeks Reformasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.1.8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.1.9 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.1.6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.2.7 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.2.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.9 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.3.3 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.3.4 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.4.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.4.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.4.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.4.7 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya MonitoringEvaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.4.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.4.3 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.4.4 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersusunnya dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE)	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI, Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti (Laporan)	1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)	1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
UPT SPAM							
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
UPT PSDA WIL. I							
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya MonitoringEvaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa KomunikasSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
UPT PSDA WIL. II							
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya MonitoringEvaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa KomunikasSumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Pemutahiran SIPD
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Pemutahiran SIPD
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Pemutahiran SIPD

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				149.008.102.029		142.181.657.886		154.790.564.507		167.304.299.872		184.611.725.059		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)	25,00	30,76	7.297.200.167	35,52	7.297.200.167	42,28	8.467.571.564	48,04	9.545.590.975	53,80	10.897.200.167		
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,11	0,13	7.297.200.167	0,15	7.297.200.167	0,18	8.467.571.564	0,2	9.545.590.975	0,23	10.897.200.167		
Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	4,98	4,98	3.105.397.500	6,0	3.105.397.500	7,0	3.741.558.897	8,0	4.205.397.500	9,0	5.105.397.500		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (lembaga)	5	5	140.790.000	5	140.790.000	5		5	350.790.000	5	340.790.000		
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	5	5	-	5	-	5	-	5	200.000.000	5	200.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	15	15	140.790.000	15	140.790.000	15	540.790.000	15	554.180.808	15	740.790.000		
UPT I														
Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1,5	1,5	220.000.000	1,5	220.000.000	1,5	220.000.000	1,5	220.000.000	1,5	220.000.000		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	28	27	34.431.000	27	34.431.000	27	109.431.000	27	159.431.000	27	234.431.000		
UPT II														
Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	-	5	3.535.000.000	6	3.535.000.000	7	3.635.000.000	8	3.635.000.000	9	3.835.000.000		
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0,2	0,3	20.791.667	0,4	20.791.667	0,5	20.791.667	0,6	20.791.667	0,7	20.791.667		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Dokumen)	34	34	100.000.000	34	100.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	15,00	16,51	12.315.397.500	18,02	12.315.397.500	19,53	12.330.397.500	21,04	13.430.397.500	22,55	14.469.657.693		
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	0,15	0,1651	12.315.397.500	0,1802	12.315.397.500	0,1953	12.330.397.500	0,2104	13.430.397.500	0,2255	14.469.657.693		
Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)	5,5	5,5	12.295.397.500	6,5	12.295.397.500	7,5	12.295.397.500	8,5	13.395.397.500	9,5	14.269.657.693		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UPT I														
Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	0,08	0,08		0,08		0,09		0,1		0,11			
UPT II														
Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai (KM)	-	0,15	20.000.000	0,2	20.000.000	0,25	35.000.000	0,3	35.000.000	0,35	200.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kapasitas Air Baku (m3/det)	0,60	0,65	-	0,73	-	0,82	400.000.000	0,93	400.000.000	1,00	400.000.000		
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Air Baku (%)	0,60	0,65	-	0,73	-	0,82	400.000.000	0,93	400.000.000	1,00	400.000.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	4	2	-	4	-	6	400.000.000	8	400.000.000	10	400.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	62,90	63,65	33.192.445.336	64,65	33.192.445.336	65,75	37.749.854.020	66,85	41.104.466.743	68,25	48.278.999.391		
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Kabupaten/Kota	62,90	63,85	33.192.445.336	64,80	33.192.445.336	67,78	37.749.854.020	64,80	41.104.466.743	67,78	48.278.999.391		
Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1,5	2,75	1.000.000.000	4	1.000.000.000	5	1.200.000.000	6	1.500.000.000	6,75	1.600.000.000		
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (Bendung)	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	1.200.000.000	0	1.500.000.000	0	1.600.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3	4,5	11.000.000.000	5,5	11.065.873.331	7,25	11.500.000.000	8,75	12.000.000.000	10,2	12.000.000.000		
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	30,20	40,50	3.382.773.331	50,50	3.200.000.000	60,75	4.500.000.000	75,50	4.600.000.000	90,35	7.000.000.000		
Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	2	4	2.500.000.000	5	2.500.000.000	6	3.629.468.433	7	6.122.931.548	7	6.965.334.638		
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	47	55	500.000.000	60	700.000.000	65	1.000.000.000	70	1.500.000.000	85	2.000.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	10	11	11.183.700.000	13	11.050.600.000	16	9.214.700.000	19	5.000.000.000	22	5.000.000.000		
Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
UPT I														
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	252	252	723.497.169	252	723.497.169	252	2.168.886.412	252	3.790.343.668	252	5.550.440.899		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Bendung)	15	15	225.593.000	15	225.593.000	15	225.593.000	15	225.593.000	15	225.593.000		
UPT II														
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	244	244	1.135.945.644	244	1.135.945.644	244	2.468.206.175	244	4.172.598.527	244	5.132.630.854		
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Bendung)	15	15	39.936.192	15	39.936.192	15	40.000.000	15	40.000.000	15	500.000.000		
Sub Kegiatan Operasaional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000		
Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)	3	5		7		9		12		15			
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	umlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)	15	15		15		15		15		15			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	92,30	94,61	1.141.346.650	95,95	1.141.346.650	97,3	1.809.574.000	98,65	3.039.574.000	100	4.539.574.000		
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota	0	0	1.141.346.650	200	1.141.346.650	200	1.809.574.000	200	3.039.574.000	200	4.539.574.000		
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	5	4	100.130.000	3	100.130.000	2	100.130.000	3	100.130.000	2	100.130.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/detik)	0	0		200		200		200		200			
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/detik)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	0	100		150		150		150		100			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	3	2	1.000.000.000	4	1.000.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	5	4	39.444.000	3	39.444.000	2	39.444.000	3	39.444.000	2	39.444.000		
UPT SPAM														
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	2	2	257.550	2	257.550	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	2	2	257.550	2	257.550	2	820.000.000	2	1.500.000.000	2	3.000.000.000		
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2	2	257.550	2	257.550	2	200.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kabupaten/Kota)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	50.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Sanitasi aman (%)	7,16	8,37	1.500.000.000	9,58	1.600.000.000	10,79	1.100.000.000	15,00	1.100.000.000	16,21	1.100.000.000		
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)	0	0	1.500.000.000	0	1.600.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan (M3/Hari)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M3/Hari)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0	50		50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.000.000.000	2	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (kabupaten/Kota)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0	0		0		0		0		0			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	0	0		0		0		0		0			
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	0	12,50	725.000.000	25,00	750.000.000	37,50	750.000.000	50,00	750.000.000	100	750.000.000		
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)	0	0	725.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan (Ton/Hari)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan (kabupaten/Kota)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/Hari)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0	0		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0	1	650.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)												
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	0	2	75.000.000	3	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	66,91	67,55	7.447.760.000	68,18	7.446.005.000	68,80	5.446.005.000	69,40	5.446.005.000	69,98	5.446.005.000		
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)	66,91	67,55	7.447.760.000	68,18	7.446.005.000	68,8	5.446.005.000	69,4	5.446.005.000	69,98	5.446.005.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	4	3	6.897.760.000	5	6.896.005.000	5	4.896.005.000	5	4.896.005.000	5	4.896.005.000		
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)	83,42	84,74	52.825.041.000	86,07	32.887.654.308	87,42	37.782.711.602	88,8	39.828.836.909	90,20	42.038.602.191		
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang terbangun	83,42	84,73	52.825.041.000	86,07	32.887.654.308	87,42	37.782.711.602	88,8	39.828.836.909	90,20	42.038.602.191		
Sub kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Unit Pengolahan Setempat/MCK individual yang tersedia (Unit)	48	97	3.708.539.100	85	3.999.000.000	104	3.999.000.000	125	3.999.000.000	100	3.999.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan (Liter/detik)	0	20		8,5		2,5		5		5			
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	48.316.501.900	0	28.007.152.408	0	32.902.209.702	0	34.948.335.009	0	37.158.100.291		
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi (Liter/Detik)	0	0	800.000.000	0	881.501.900	0	881.501.900	0	881.501.900	0	881.501.900		
Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	0	0		0		1		0,1		0,1			

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	10,00	15,5	1.250.000.000	21,00	1.250.000.000	26,5	2.259.823.547	32,00	3.079.284.892	37,50	4.524.753.357		
Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Presentase Penataan Bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10,00	15,5	1.250.000.000	21,00	1.250.000.000	26,5	2.259.823.547	32,00	3.079.284.892	37,50	4.524.753.357		
Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	1.109.823.547	2	1.129.284.892	2	2.024.753.357		
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	700.000.000	2	1.100.000.000	3	1.500.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0	3	250.000.000	3	250.000.000	3	450.000.000	3	850.000.000	3	1.000.000.000		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)	24,29	26,93	700.000.000	29,57	700.000.000	32,22	1.200.000.000	34,86	2.041.430.216	37,50	2.420.493.286		
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		24,29	26,93	700.000.000	29,57	700.000.000	32,22	1.200.000.000	34,86	2.041.430.216	37,50	2.420.493.286		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	250.000.000	2	641.430.216	2	720.000.000		
Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Kabupaten/Kota)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	1	700.000.000	1	820.000.000		
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	880.493.286		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Perangkat Daerah			30.613.911.376		43.601.608.925		45.494.627.274		47.538.713.637		49.746.439.975		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80.000.000		80.000.000		380.000.000		580.000.000		880.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	250.000.000	7	350.000.000	7	650.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	130.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah			445.000.000		445.000.000		745.000.000		1.145.000.000		1.645.000.000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	95.000.000	2	95.000.000	2	295.000.000	2	495.000.000	2	695.000.000		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	450.000.000	3	650.000.000	3	950.000.000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah			10.000.000		10.000.000		41.006.116		122.368.237		58.277.017		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.503.058	2	66.184.119	2	29.138.508		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.503.058	2	56.184.119	2	29.138.508		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Tindakanjnt Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP			-		-		-		-		-		
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah			26.261.699.709		39.456.488.925		39.787.495.041		40.112.673.044		40.504.765.942		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/Bulan)	217	217	26.161.699.709	556	26.161.699.709	556	26.161.699.709	556	26.161.699.709	556	26.161.699.709		
Gaji PPPK						10.828.789.216		10.828.789.216		10.828.789.216		10.828.789.216		
Gaji CPNS						2.366.000.000		2.366.000.000		2.366.000.000		2.366.000.000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	431.006.116	1	756.184.119	1	1.148.277.017		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Sub Keiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan			250.000.000		250.000.000		550.000.000		906.184.119		1.250.000.000		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	550.000.000	1	906.184.119	1	1.250.000.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah			5.000.000		5.000.000		55.000.000		155.000.000		255.000.000		
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	55.000.000	100	155.000.000	100	255.000.000		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		50		50		50		50			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK			50.000.000		50.000.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI			-		-		-		-		-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjuti Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor			65.000.000		65.000.000		165.000.000		365.000.000		565.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	65.000.000	1	165.000.000	1	265.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE			-		-		-		-		-		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	0		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			818.000.000	818.000.000		918.000.000		1.018.000.000		1.118.000.000			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	0	0		1		1		1		1			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	818.000.000	818.000.000	12	918.000.000	12	1.018.000.000	12	1.118.000.000			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi			2.262.211.667	2.055.120.000		2.255.120.000		2.255.120.000		2.355.120.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	2.262.211.667	2.055.120.000	1	2.255.120.000	1	2.255.120.000	1	2.355.120.000			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			367.000.000	367.000.000		498.006.117		679.368.237		815.277.017			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	38		38		38		38		38			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	3	4	350.000.000	350.000.000	4	450.000.000	4	550.000.000	4	585.908.779			
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	17.000.000	17.000.000	1	48.006.117	1	129.368.237	1	229.368.237			
UPT SPAM														
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)			5.997.054	5.997.054		207.595.700		228.270.615		257.091.705			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.149.276	3.149.276	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.091.705			
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	257.550	257.550	1	6.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000			
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1	446.571	446.571	1	13.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	740.332	740.332	1	18.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	403.325	403.325	1	595.700	1	1.270.615	1	2.000.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000			

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			20.149.096		20.149.096		30.000.000		60.000.000		80.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	20.149.096	1	20.149.096	1	30.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			844.906.200		786.946.200		844.906.200		844.906.200		1.002.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1	1.666.200	1	1.666.200	1	1.666.200	1	1.666.200	1	2.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1	310.200.000	1	310.200.000	1	310.200.000	1	310.200.000	1	400.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	533.040.000	1	475.080.000	1	533.040.000	1	533.040.000	1	600.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.630.000		24.630.000		86.600.000		456.600.000		565.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	1	21.600.000	1	30.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	2.030.000	1	2.030.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	30.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000		
UPT PSDA WIL. I														
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)			1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.480.000	1	1.480.000	1	1.480.000	1	1.480.000	1	1.480.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)			11.508.360		11.508.360		11.508.360		11.508.360		11.508.360		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	11.508.360	1	11.508.360	1	11.508.360	1	11.508.360	1	11.508.360		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.931.820.000		1.747.800.000		1.747.800.000		1.747.800.000		1.747.800.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.841.820.000	1	1.657.800.000	1	1.657.800.000	1	1.657.800.000	1	1.657.800.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134.135.640		134.135.640		134.135.640		134.135.640		134.135.640		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1.380.000	1	1.380.000	1	1.380.000	1	1.380.000	1	1.380.000		

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.755.640	1	2.755.640	1	2.755.640	1	2.755.640	1	2.755.640		
UPT PSDA WIL. II														
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)			29.810.000		29.810.000		29.810.000		29.810.000		29.810.000		
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	29.810.000	1	29.810.000	1	29.810.000	1	29.810.000	1	29.810.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)			43.576.367		43.576.367		47.576.367		47.576.367		51.576.367		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	41.576.367	1	41.576.367	1	41.576.367	1	41.576.367	1	41.576.367		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.257.200.000		2.257.200.000		2.257.200.000		2.257.200.000		2.257.200.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.167.200.000	1	2.167.200.000	1	2.167.200.000	1	2.167.200.000	1	2.167.200.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.565.300		38.565.300		38.565.300		41.565.300		63.565.300		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	18.361.500	1	18.361.500	1	18.361.500	1	18.361.500	1	18.361.500		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	19.203.800	1	19.203.800	1	19.203.800	1	20.203.800	1	40.203.800		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kawasan permukiman yang terlindungi	%	12,56	15,45	17,84	21,23	24,12	27,02	
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	61,21	61,96	62,96	64,21	65,46	66,96	
3	Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	30,29	32,00	33,00	34,00	37,88	41,76	
4	Persentase rumah tangga terhadap Akses sanitasi aman	%	7,16	8,37	9,58	10,79	15,00	16,21	
5	Persentase Kualitas Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kewenangan Provinsi	%	10,08	12,50	25,00	37,50	50,00	100,00	
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	66,91	67,55	68,18	68,8	69,4	69,98	
7	Persentase Kualitas Infrastruktur Permukiman	%	83,43	84,74	86,07	87,42	88,80	90,20	
8	Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan strategis provinsi	%	17,15	21,22	25,29	29,36	33,43	37,50	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	61,21	61,96	62,96	64,21	65,46	66,96	
2	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	30,29	32,00	33,00	34,00	37,88	41,76	
3	Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Aman	%	7,16	8,37	9,58	10,79	15,00	16,21	
4	Ketahanan Air : Kapasitas Air Baku	m3/det	0,6	0,65	0,73	0,82	0,93	1,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran selama kurun waktu Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan Misi 3 : Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan dan sub kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, merupakan rangkaian yang sistematis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Misi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Guna menjaga konsistensi dan keselarasan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka penyusunan Renja SKPD wajib berpedoman pada Renstra SKPD ini;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sesuai dengan Isu Strategis daerah dan perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Renstra ini juga merupakan Implementasi penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dinas/badan dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.